

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Di Indonesia perlistrikan di mulai sejak awal abad ke-19, digunakan untuk penerangan sebagai ganti lampu-lampu minyak dan lampu gas. Pada saat itu perusahaan pelistrikan yang ada di Indonesia dipegang dan diselenggarakan secara monopoli oleh perusahaan swasta Belanda. Pada awal tahun 1905, saat Indonesia masih berada pada masa penjajahan oleh pemerintah Hindia Belanda, perusahaan listrik di daerah Bandung mulai berdiri. Perusahaan listrik tersebut di monopoli oleh perusahaan partikelir Belanda yaitu "Bandoengsche Electicitet Maatschappij" (BEM), yang memperoleh izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan perusahaan listrik di daerah jajahannya dengan tugas membuat jaringan-jaringan listrik di kota Bandung dan sekitarnya.

Sedangkan pada tahun 1913, pengelola usaha pembangkit dan penyalur tenaga listrik dilaksanakan oleh "Land Waterkraccht Bedrijf" (LWB) yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1919, perusahaan BEM dihapuskan dan digantikan oleh perusahaan berbadan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat 24 sero (saham) dengan tugas melaksanakan pengusahaan distribusi tenaga listrik di daerah Bandung dan sekitarnya. Pergantian ini dikukuhkan dengan Akte Pendirian Notaris oleh Mr. Andrian Hendrik Van Ophusen No. 213. Perusahaan tersebut

diberi nama GEBEO NV (Gemeanschppelij Electricient Bedrijf Voor Bandoeng Omstroken) dan peralihan itu tepatnya dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1920.

Seiring dengan kekalahan Belanda terhadap Jepang, maka pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 penguasaan dan pengusahaan pelistrik di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya secara otomatis beralih dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang. Pada masa penjajahan Jepang pengusahaan dan distribusi listrik dilakukan oleh "Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sah" yang bertugas mendistribusikan tenaga listrik dan "Seiboe Denki Djigjo Sah" yang bertugas mengelola pembangkit tenaga listrik dan penyalurannya pada kurun waktu 1942-1943, kemudian berubah menjadi "Denki Kosha" dengan wilayah kerja seluruh wilayah pulau Jawa.

Sehubungan dengan di dudukinya kembali Indonesia oleh Belanda dan pindahnya pemerintah Indonesia ke Yogyakarta pada tahun 1948, maka pengusahaan dan pendistribusian tenaga listrik khususnya di Jawa Barat dan Jakarta dikuasai kembali oleh perusahaan Belanda yaitu GEBEO NV, sedangkan untuk pembangkit dan penyalurannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik (PENUPETEL) dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat dan Jakarta. Pada tahun 1952 berdiri pula PENUDITEL (Perusahaan Negara untuk Pendistribusian Tenaga Listrik) dan akhirnya PENUPETEL dan PENUDITEL berada di bawah naungan jawatan listrik.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No.163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa Belanda, yaitu jika konsesi

pengusahaannya telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik swasta tersebut di ambil alih dan digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1957, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah RI menerbitkan Undang-undang tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.18 tahun 1959 tentang nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan peraturan Listrik dan Gas (P3LG) dikenai proses pengalihan kepemilikan.

Melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.P25/45/14 tanggal 23 September 1958, Jawatan Tenaga di ubah menjadi Perusahaan Listrik Negara. Setelah Dewan Direktur Perusahaan Listrik Negara (DD PLN) terbentuk, yaitu pada tahun 1959 P3LG dibubarkan. Berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.67 tahun 1961 Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) terbentuk. PLN terbentuk melalui PP No.19 tahun 1965 yang bernaung di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL). Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada saat itu menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan umum listrik negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.1/PRT/1965 tanggal 21 Januari 1965 dan PP No.19 tahun 1965, diadakan reorganisasi PLN dimana BPU PLN dihapus dan di tingkat daerah di bentuk susunan organisasi PLN yang di sebut PLN Eksplorasi XI, yang berkedudukan di Bandung dengan wiayah kerja seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang, Bogor, Sukabumi, dan Banten.

Perkembangan selanjutnya adalah dikeluarkannya PP No.18 tahun 1972 tentang pembentukan Perusahaan Umum Listrik Negara yang berkantor pusat di Jakarta dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No.043/PMS/1975 tanggal 9 September 1975 tentang tata kerja perusahaan-perusahaan listrik negara, maka PLN mengadakan reorganisasi dalam tugas dan wilayah di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman No.05/D.III/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975 maka PLN Eksplorasi XI di ganti namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi III yang bertugas untuk melaksanakan dan mengusahakan distribusi listrik langsung kepada pemakai atau konsumen.

Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan PP no.19 tahun 1956 Jo, PP No.11 tahun 1956 dan PP No.30 tahun 1970 ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana termasuk dalam pasal 2 ayat (2) UU No.9 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Listrik Negara. Dengan adanya PP RI No.23 tahun 1994 pada tanggal 16 Juli 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang termuat dalam lembaran Negara RI tahun 1994 No.34 maka bentuk Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian kemudian melalui surat keputusan direksi PT. PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat. Kemudian melalui surat keputusan PT. PLN (Persero) No. 120.K/010/DIR/2002 tanggal

27 Agustus 2002 , PT. PLN (Persero) unit bisnis Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang restrukturisasi di tubuh PLN,tanggal 20 Februari 2001. Agar lebih terarah dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggannya, sesuai dengan Keputusan Pimpinan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat No.145 K/021/PD III/2000 tanggal 1 Desember maka PT. PLN (Persero) Rayon Timur berubah menjadi UPP (Unit Pelayanan Pelanggan) Bandung Timur. Seperti halnya PT. PLN (Persero) Rayon Bandung Timur, PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur secara struktur masih berada dalam kendali PT. PLN (Persero) Cabang Bandung. Saat ini PLN Distribusi Jawa Barat mempunyai 15 (Lima Belas) cabang, 1 Bengkel Distribusi,yang bila di perinci adalah sebagai berikut:

1. Cabang Cirebon
2. Cabang Tasikmalaya
3. Cabang Cianjur
4. Cabang Sukabumi
5. Cabang Bogor
6. Cabang Banten
7. Cabang Garut
8. Cabang Purwakarta
9. Cabang Cimahi
10. Cabang Bandung
11. Cabang Majalaya

12. Cabang Bekasi
13. Cabang Depok
14. Cabang Sumedang
15. Cabang Karawang
16. Unit Pengatur Distribusi,dan
17. Kantor Distribusi

2.2 Struktur Organisasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) UPP Bandung Timur

Struktur organisasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) UPP Bandung Timur dipimpin oleh seorang manajer. Manajer melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Manajer dan dengan adanya pemisahan fungsi berdasarkan struktur organisasi yang menerangkan uraian tugas yang jelas sehingga menjadi alat untuk mendukung struktur pengendalian intern yang baik. Masing-masing kepala bagian membawahi staf ahli dibidangnya yang membantu tugas kepala bagian karena luasnya struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, maka penulis menguraikan struktur organisasi dan ruang lingkup kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Adapun Asisten Manajer terdiri dari :

1. Asisten Manajer PP & SAR
2. Asisten Manajer Pencatatan Meter
3. Asisten Manajer Penagihan
4. Asisten Manajer Administrasi & Keuangan

5. Asisten Manajer Distribusi
6. Asisten Manajer Penyambungan

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi ini dapat dilihat pada lampiran I

2.3 Deskripsi Jabatan PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur

1. Manajer

Tugas Manajer adalah mengawasi kegiatan operasional, meliputi kegiatan Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan & Pemasaran, Pencatatan Meter, Administrasi & Keuangan, Distribusi dan Asisten Manajer Penyambungan.

2. Asisten Manajer PP & SAR

Bertugas :

1. Memberikan pelayanan pelanggan tambah daya, perubahan daya dan pasang baru.
2. Survei data pelanggan.
3. Mutasi data pelanggan.
4. Mencetak kartu induk data pelanggan.

Bertanggung jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat umum.
2. Bertanggung jawab terhadap hasil mutasi data pelanggan.

3. Asisten Manajer Pencatatan Meter

Bertugas :

1. Mencatat Kwh meter.
2. Pengolahan data cater.
3. Memeriksa pengaduan pelanggan.
4. Memeriksa data cater.
5. Pencatatan rekening listrik.
6. Memeriksa rekening yang salah.

Bertanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian pada kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter alat pengukur meter Kwh, meter KUARH, meter KVA maksimal, pada setiap pelanggan meter, serta pembacaan dan pencatatan penunjukan saklar waktu.

4. Asisten Manajer Penagihan

Bertugas :

1. Pelayanan pembayaran rekening.
2. Mutasi rekening antar satuan.
3. Pelayanan pembayaran rekening giralisasi.
4. Pembuatan perintah pemutusan.
5. Pendistribusian rekening listrik ke payment point.

Bertanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik dan piutang lain).

5. Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan

Bertugas :

1. Pelayanan kepegawaian.
2. Pencatatan Akuntansi.
3. Pelayanan pembayaran biaya pembangunan.
4. Menangani masalah rumah tangga dan umum.
5. Pengelolaan bank receipt.
6. Pengelolaan kas/bank imprest.
7. Menangani masalah kesekretariatan.

Bertanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pencatatan piutang pelanggan dan uang jaminan pelanggan.

6. Asisten Manajer Distribusi

Bertugas :

1. Merencanakan jumlah pelanggan yang harus dibuat rekening listriknya.
2. Merencanakan jadwal pembuatan rekening listrik.
3. Membubuhkan tanda pengesahan rekening listrik.

Bertanggung jawab :

Bertanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian jadwal yang telah ditetapkan.

7. Asisten Manajer Penyambungan

Bertugas :

1. Penyambungan pasang baru.
2. Pelaksanaan tambah daya.
3. Pemutusan aliran listrik.
4. Mutasi daya tersambung.

Bertanggung jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap hasil penghapusan piutang.
2. Bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pemutusan sementara, penyambungan kembali.

2.4 Aspek Kegiatan perusahaan

Pada intinya, aspek kegiatan PT. Perusahaan Listrik Negara adalah menjual produk berupa energi listrik yang biasa dipergunakan untuk menjalankan mesin dan penerangan. Berdasarkan tujuan pemakaian listrik, maka energi listrik yang dijual kepada pelanggan dibagi ke dalam beberapa golongan tarif, yaitu :

1. Tarif S (Kepentingan Sosial)
2. Tarif R (Rumah Tangga Kecil dan Besar)
3. Tarif Bisnis (Bisnis)
4. Tarif I (Industri)

5. Tarif P (Pemerintah dan Penerangan Jalan umum)

Berdasarkan Keppres No 83 thn 2001, ditambahkan golongan tarif baru, yaitu Tarif T (Traksi / Kereta Listrik) dan Tarif Curah. Untuk keperluan khusus, PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat menyediakan golongan Tarif Multiguna yang diperuntukan bagi tenaga listrik dengan persyaratan khusus atau spesifik serta memberi nilai tambah bagi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun bagi pelanggan. Transaksi multiguna sangat menguntungkan karena dibuat berdasarkan kesepakatan semua pihak melalui proses negosiasi tersendiri.

Jenis transaksi multiguna terdiri dari transaksi energi listrik maupun non energi listrik. Transaksi energi listrik meliputi multiguna Ekspor – Impor musiman, prabayar, beban dapat diatur, listrik hari libur. Transaksi non energi listrik adalah penyediaan tingkat keandalan layanan, penyediaan fasilitas ketenaga kerjaan dan penyediaan layanan jasa ketenaga listrikan.